

Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sebagai ruang publik dalam menghadapi masyarakat informasi

¹Adzkiyah Mubarakah

¹Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Bengkulu, Indonesia.

Email: adzkiyahmubarakah@unib.ac.id

Naskah diterima: 05 Maret 2026, direvisi: 09 April 2026, diterima: 09 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to identify service innovations developed by the Library Service Center of DPAD DIY in responding to the information society, using Jürgen Habermas's concept of the public sphere. The research employs a qualitative descriptive approach. Informants were selected through purposive and snowball sampling techniques, allowing the number and characteristics of participants to evolve throughout the research process. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the information society significantly influences the emergence of innovations within the library. The information society is understood as a phase of societal development that brings inevitable changes. Service innovations can be examined through the public sphere concept, including: the library as a medium for advocating and fulfilling community needs; the presence of discourse through both direct interaction and digital media such as questionnaires, satisfaction surveys, suggestion boxes, and Public Consultation Forums; service transformation through the utilization of information technology and applications and changes in service functions, where some traditional services are no longer relevant or efficient in meeting the evolving needs of the information society.

Keywords: information society; innovation; library services; public sphere; service transformation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi inovasi layanan yang dikembangkan oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY dalam menghadapi masyarakat informasi dengan menggunakan konsep ruang publik Jürgen Habermas. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive dan snowball sampling, sehingga jumlah serta karakteristik informan berkembang selama proses penelitian berlangsung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat informasi memberikan pengaruh signifikan terhadap munculnya inovasi di perpustakaan. Masyarakat informasi dipahami sebagai fase perkembangan yang membawa perubahan yang tidak dapat dihindari. Inovasi layanan yang dikembangkan dapat ditinjau melalui konsep ruang publik, meliputi: perpustakaan sebagai wahana perjuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat; adanya diskursus melalui interaksi langsung dan media digital seperti kuesioner, survei kepuasan, kotak saran, dan Forum Konsultasi Publik, transformasi layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi; serta perubahan fungsi layanan, di mana sebagian layanan lama tidak lagi relevan atau efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat informasi.

Kata Kunci: inovasi; layanan perpustakaan; masyarakat informasi; ruang publik; transformasi layanan

1. PENDAHULUAN

Perpustakaan masa kini terus bertransformasi seiring dinamika zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Tidak lagi sekadar tempat penyimpanan koleksi, perpustakaan berperan sebagai pusat sumber informasi yang dituntut untuk menghadirkan berbagai inovasi guna

menjawab kebutuhan pengguna yang kian beragam. Dalam menjalankan fungsinya, perpustakaan bertanggung jawab untuk menghimpun, mengelola, mengolah, menyediakan, menyebarluaskan, serta melestarikan informasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat (Hartono, 2017). Kehadiran masyarakat informasi mendorong peran pustakawan menjadi semakin strategis, tidak hanya sebagai pengelola koleksi, tetapi juga sebagai aktor utama yang aktif, adaptif, dan mampu bersaing dalam lingkungan profesional yang luas dan dinamis (Hartono, 2017).

Masyarakat informasi saat ini memiliki kebutuhan informasi yang semakin beragam, kompleks, dan bersifat kritis. Dalam kondisi tersebut, perpustakaan dituntut untuk mampu menyediakan layanan informasi yang relevan, sekaligus tetap bertahan dan menunjukkan kreativitas dalam merespons dinamika kebutuhan pengguna. Sebagai pusat informasi, perpustakaan harus menunjukkan kinerja yang optimal dengan terus meningkatkan mutu layanan, khususnya di tengah era digitalisasi dan arus globalisasi informasi (Masriastri, 2018).

Perpustakaan menyelenggarakan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan inklusif. Layanan tersebut beroperasi dalam konteks ruang publik sebagai wadah interaksi bagi masyarakat informasi. Konsep ruang publik sendiri bukanlah gagasan baru; menurut Jürgen Habermas, ruang publik dipahami sebagai ranah kehidupan sosial yang memungkinkan terbentuknya opini publik melalui proses komunikasi. Dalam pengertian ini, ruang publik menekankan keterbukaan akses bagi seluruh warga negara, di mana setiap bentuk pertemuan, diskusi, atau percakapan yang melibatkan individu dapat dipandang sebagai bagian dari ruang public (Habermas, 1964).

Konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas merepresentasikan keterkaitan antara pemikiran filsafat dan praktik perpustakaan. Keterhubungan tersebut tampak dari kesamaan fungsi keduanya sebagai arena perjuangan. Ruang publik dipahami sebagai ruang sosial untuk melawan dominasi dan penindasan kekuasaan, sementara perpustakaan berperan sebagai sarana menghadapi keterbatasan akses, ketertinggalan, serta minimnya pemahaman terhadap informasi dan pengetahuan. Keduanya juga memiliki karakteristik yang sejalan, seperti prinsip kesetaraan, keterbukaan akses, proses diskursus, dan kemandirian. Seiring perkembangan zaman, baik ruang publik maupun perpustakaan mengalami proses transformasi (Sumaryanto, 2010).

Perpustakaan umum dapat dipandang sebagai representasi paling nyata dari ruang publik dalam masyarakat informasi. Hal ini disebabkan karena di perpustakaan umum setiap individu memiliki peluang yang setara untuk menyampaikan pendapat, mengekspresikan diri, serta mengakses berbagai informasi dan berita melalui ruang global yang disediakannya. Kehadiran perpustakaan umum membuka akses informasi yang sebelumnya tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Hendrawan, 2015).

Sebagai ruang publik, perpustakaan memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, perpustakaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa pun tanpa diskriminasi. Kedua, pembiayaan kegiatan perpustakaan umumnya bersumber dari dana publik, baik tingkat pusat maupun daerah, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat gratis atau sangat terjangkau.

Ketiga, perpustakaan menyediakan akses informasi yang luas, termasuk layanan peminjaman koleksi yang mendukung kepuasan pengguna. Keempat, keberadaan jaringan perpustakaan dikelola dan dikoordinasikan oleh pustakawan profesional yang bekerja secara objektif, tanpa kepentingan tersembunyi maupun prasangka tertentu (Sumaryanto, 2010). Keterkaitan antara perpustakaan umum dan konsep ruang publik juga telah diuraikan oleh Y. Sumaryanto dalam tesisnya pada tahun 2010, yang menjelaskan bagaimana perpustakaan umum berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan komunikasi publik dalam masyarakat informasi.

	Ruang Publik	Perpustakaan Umum
--	---------------------	--------------------------

Dasar Pendirian	Melakukan kritik tersendiri terpisah dari kekuasaan tradisional	Mendukung, mempermudah orang memperoleh informasi, memungkinkan orang untuk belajar seumur hidup
Sarana Pendukung	Dukungan kepada dunia sastra Kebebasan berbicara Reformasi parlemen	Jaringan perpustakaan: Komitmen untuk melakukan layanan secara cuma-cuma kepada pengguna dengan menggantungkan dana dari APBN/APBD
Pemrakarsa	Pengusaha kapitalis	Negara/pemerintah, Masyarakat

Tabel 1. Hubungan Ruang Publik dan Perpustakaan Umum
Sumber: (Y.Sumaryanto, 2010).

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa ruang publik dan perpustakaan umum memiliki tiga unsur utama, yaitu landasan pendirian, fasilitas pendukung, serta pihak penggagas atau pengelolanya. Pemikiran Jürgen Habermas mengenai ruang publik memiliki keterkaitan erat dengan konteks perpustakaan. Konsep tersebut tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga dapat diterapkan dalam pembahasan maupun praktik penyelenggaraan layanan perpustakaan sebagai ruang interaksi, pertukaran gagasan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Perpustakaan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY yang dikenal dengan Grhatama Pustaka, menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini didasarkan pada prestasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menempati peringkat pertama pada Rakornas Bidang Perpustakaan tahun 2023 kategori provinsi, dengan capaian tertinggi pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan tingkat kegemaran membaca. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sebagai unit layanan yang secara langsung berinteraksi dengan Masyarakat (Perpusnas, 2023).

Di balik keberhasilan tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi tantangan sosial yang cukup serius, yaitu tingginya angka kemiskinan yang mencapai 10,23% pada Maret 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat literasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan masyarakat, terutama dalam mengurangi kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup. Peran ini selaras dengan konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, yang menempatkan ruang publik sebagai arena perjuangan sosial.

Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY mulai beroperasi pada tahun 2015 dan berlokasi di Jalan Janti, Banguntapan, Bantul. Penamaan Grhatama Pustaka ditetapkan langsung oleh Gubernur DIY, dan pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan perpustakaan ini mengusung konsep tradisional-modern yang memadukan nilai budaya Jawa dengan fasilitas modern. Desain tersebut tidak hanya mencerminkan kemegahan arsitektur, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat kontemporer serta merepresentasikan nilai-nilai Wulung, Prakoso, Wangi, dan Agung sebagai simbol keistimewaan Yogyakarta (Grhatama Pustaka, 2023).

Dalam pelaksanaannya, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY terus melakukan pembaruan dan inovasi layanan guna memenuhi tuntutan masyarakat informasi. Upaya perluasan akses diwujudkan melalui penyediaan tiga lokasi layanan tetap, yaitu Grhatama Pustaka, Jogja Library Center, dan Rumah Belajar Modern. Keberadaan ketiga lokasi tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpustakaan dengan fokus yang berbeda-beda, sekaligus mencerminkan kesadaran perpustakaan terhadap fungsinya sebagai ruang publik.

Keberadaan kajian pustaka menjadi elemen penting untuk menelusuri sejauh mana topik serupa telah diteliti. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ruang publik dan perpustakaan. Pada tahun 2020, Ika Krismayani mengkaji

konsep ruang publik yang tidak hanya terbatas pada layanan inti perpustakaan. Penelitiannya menyoroti unit usaha berupa kantin di perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) yang dipandang dapat mendukung terbentuknya *public sphere* bagi pemustaka (Krismayani, 2020).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Kira Del Mar dari Oslo Metropolitan University pada tahun 2021 dengan judul *Supplementary Materials for the Talk "Public Sphere Institutions or Safe Spaces — Can Libraries Be Both?"*. Studi ini bertujuan mengkaji perpustakaan sebagai institusi ruang publik sekaligus ruang aman. Metode yang digunakan adalah survei melalui media sosial dan wawancara dengan pustakawan (Mar, 2021). Kajian mengenai ruang publik dan perpustakaan umum juga dilakukan oleh Femi Nur Fitriyani pada tahun 2021 dengan judul *Pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Pemikiran Jürgen Habermas*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep ruang publik menurut Jürgen Habermas dalam konteks perpustakaan umum Kabupaten Magelang. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif (Fitriyai, 2021).

Dari kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas serta unsur kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari studi sebelumnya. Pertama, dari objek penelitian yakni sebagai unit layanan perpustakaan daerah yang memiliki karakteristik tersendiri. Kedua, dari konteks kajian, penelitian terdahulu lebih banyak membahas perpustakaan sebagai ruang interaksi sosial atau ruang aman (*safe space*). Ketiga, dari pendekatan teoretis, meskipun sama-sama menggunakan teori ruang publik Habermas, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi prinsip-prinsip ruang publik seperti aksesibilitas, inklusivitas, dan independensi dalam layanan Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Keempat, fokus analisis, penelitian ini menelaah bagaimana inovasi layanan, pemanfaatan fasilitas, serta penyebaran lokasi layanan tetap berkontribusi pada pembentukan ruang publik yang setara bagi masyarakat.

Didasari pada pertanyaan utama mengenai bagaimana Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY menjalankan perannya sebagai ruang publik dalam menghadapi masyarakat informasi. Pertanyaan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa fokus kajian, yaitu bagaimana bentuk inovasi layanan yang dikembangkan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat informasi, bagaimana konsep ruang publik Jürgen Habermas diterapkan dalam layanan perpustakaan, bagaimana proses diskursus dan partisipasi masyarakat berlangsung dalam pengembangan layanan perpustakaan, bagaimana transformasi layanan perpustakaan terjadi seiring perkembangan teknologi informasi, serta bagaimana tantangan dan keterbatasan yang dihadapi perpustakaan dalam menjalankan fungsi sebagai ruang publik yang inklusif dan terbuka bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai upaya untuk memahami secara mendalam fenomena perpustakaan sebagai ruang publik dalam menghadapi masyarakat informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai inovasi layanan, transformasi perpustakaan, serta bentuk partisipasi masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori ruang publik Jürgen Habermas sebagai landasan analisis untuk memahami hubungan antara perpustakaan, masyarakat informasi, dan ruang publik.

Kajian ini berpotensi menemukan berbagai bentuk inovasi layanan yang dikembangkan Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY dalam menghadapi masyarakat informasi, baik melalui layanan digital, pengembangan ruang publik, maupun program berbasis inklusi sosial. Selain itu, dapat ditemukan pula bagaimana prinsip-prinsip ruang publik seperti keterbukaan akses, kesetaraan, partisipasi masyarakat, dan diskursus diterapkan dalam layanan perpustakaan. Transformasi layanan perpustakaan dari layanan konvensional menuju layanan berbasis teknologi digital juga menjadi bagian penting yang dapat terungkap dalam penelitian ini, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi perpustakaan dalam mempertahankan fungsi idealnya sebagai ruang publik di tengah perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebutuhan masyarakat.

Hasil kajian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Dari sisi teoritis, pembahasan mengenai perpustakaan sebagai ruang publik dapat memperkaya pengembangan kajian teori ruang publik Jürgen Habermas, khususnya dalam konteks masyarakat informasi dan transformasi layanan perpustakaan. Kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY dalam meningkatkan kualitas layanan yang lebih inklusif, adaptif, dan partisipatif. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi perpustakaan umum lainnya dalam mengembangkan inovasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat informasi di era digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara utuh berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Pendit, 2003). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada pandangan Glaser dan Strauss yang menekankan bahwa penelitian kualitatif perlu memuat berbagai elemen penting, seperti kondisi yang melatarbelakangi suatu fenomena, norma yang berlaku, bentuk penyimpangan atau kendala yang muncul, serta proses, pola, dan sistem sosial yang berkembang dalam konteks penelitian. Elemen-elemen tersebut dikaji sebagaimana dialami dan dirasakan oleh subjek penelitian dalam kehidupan nyata.

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perpustakaan ini telah memperoleh akreditasi sangat baik (A). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian melalui kegiatan observasi lapangan serta wawancara mendalam dengan informan. Data ini bersifat aktual karena diperoleh secara langsung dari sumbernya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, skripsi, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan subjek dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman mereka terhadap fenomena yang diteliti. Subjek penelitian ini meliputi pemustaka, kepala perpustakaan, pustakawan, serta staf Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan berbagai inovasi layanan, serta merasakan secara langsung dampak dari inovasi yang diterapkan. Jumlah informan dalam penelitian ini bersifat fleksibel karena menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian kualitatif. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, sehingga jumlah serta karakteristik informan dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung (Suardi, 2019). Proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah mencapai titik kejenuhan.

Dalam pelaksanaannya, peneliti memperoleh informasi yang dianggap memadai dari total 12 informan, yang terdiri atas satu kepala perpustakaan, delapan staf Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, serta tiga orang pemustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL

Mencermati situasi dan kondisi perpustakaan umum Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Terlihat bahwa perpustakaan dan ilmu filsafat memiliki beberapa kedekatan dan hubungan, maka peneliti mengambil konsep teori Jürgen Habermas berkaitan dengan ruang publik dan tindakan komunikatif, yang diimplementasikan pada perpustakaan dalam tujuan menghadapi masyarakat informasi dengan cara melakukan inovasi-

inovasi yang berkaitan, agar aspek tersebut mampu terpenuhi di tengah perkembangan teknologi dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Ruang publik Jurgen Habermas yang menjadi bahasan pada penelitian ini memiliki beberapa penerapan di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY memiliki prinsip dan layanan yang ditujukan untuk seluruh masyarakat dan dapat dilayanankan aksesnya secara merata yakni konsep *Library for All* dan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Konsep teori ruang publik terhadap perpustakaan umum telah digunakan beberapa kali pada penelitian. Pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

3.1. Wahana perjuangan: pemenuhan kebutuhan koleksi

Pemenuhan kebutuhan koleksi menjadi hal yang paling diperhatikan sebagai layanan publik. Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY selaku perpustakaan umum menjadi contoh terbaik terhadap hubungan antara ruang publik dan perpustakaan. Perpustakaan sebagai ruang publik tentunya memperhatikan kebutuhan masyarakat informasi yang meliputi berbagai kebutuhan yang semakin beragam dan dari berbagai rentang usia.

Keberagaman kebutuhan koleksi menyebabkan Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY terus melakukan inovasi dalam melayani kebutuhan masyarakat dan berusaha untuk memberikan koleksi yang bermanfaat, namun walaupun perpustakaan ini merupakan perpustakaan umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 238.164 judul koleksi dengan 375.984 buku tercetak. Serta memiliki koleksi *e-book* sebanyak 9878 *e-book* milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY yang bisa diakses dalam bentuk inovasi aplikasi iJogja. tetap saja ada beberapa koleksi yang belum bisa mencangkupi seluruh kebutuhan pemustaka.

Kekurangan koleksi ini dijelaskan oleh informan Tita terletak pada koleksi novel dan juga buku khusus untuk lansia. Koleksi buku lansia biasanya memiliki ukuran huruf yang lebih besar. Buku lansia tersebut belum tersedia, namun untuk layanan lansia lainnya sudah dilakukan oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY.

Solusi yang diberikan dari kebutuhan koleksi yang masih belum tersedia selain buku tercetak dan aplikasi iJogja. Bentuk inovasi lainnya yang dilakukan Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY yakni kerjasama salah satunya dengan membentuk inovasi Sepatu Jolifa (Layanan Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All), sistem ini berupa sebuah jaringan yang berisi informasi dan koleksi perpustakaan yang dapat diakses secara *online* oleh masyarakat, di mana sistem ini akan memuat berbagai informasi dan koleksi dari berbagai perpustakaan yang ada di Yogyakarta, sehingga terjalin suatu sistem yang mengintegrasikan perpustakaan-perpustakaan yang ada di Yogyakarta.

Sepatu Jolifa (Layanan Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) ada sejak tahun 2005 namun awalnya diberi nama Jogja Library for All, berubah nama karena diikuti sertakan dalam kompetensi layanan publik di tahun 2019 bertujuan membangun *branding* baru menjadi Sistem Layanan Terpadu Jogja Library for All (Sepatu Jolifa) agar masyarakat lebih kenal lagi layanan JLA ini. Nama Sepatu Jolifa terkesan unik dan mudah diingat. Sudah ada 41 perpustakaan yang ikut serta dalam sistem layanan perpustakaan terpadu Sepatu Jolifa di laman <http://jogjalib.com/>.

Pemenuhan kebutuhan koleksi lainnya yang dilakukan melalui proses kerjasama diterapkan pula oleh Jogja Library Center. Jogja Library Center (JLC) menjalin kerjasama koleksi dengan Kyoto Book Corner dari Jepang dan ada juga hibah koleksi Yogyasiana yang berisi buku ataupun karya tulis berkaitan dengan Yogyakarta, serta ada juga kerjasama dengan majalah Koreana yang dikirim langsung dari Korea.



Gambar 1. Kyoto Book Corner dan Koleksi Majalah Koreana

3.2. Wahana perjuangan: pemenuhan kebutuhan layanan

Pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat bagi perpustakaan menjadi hal yang penting selaku layanan publik. Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY memiliki 22 jenis layanan yang siap untuk digunakan oleh pemustaka. Namun ada saja layanan yang dirasa masih belum optimal selaku ruang publik, baik dikarenakan anggaran maupun kendala lainnya. Selaku perpustakaan umum fasilitas dan layanan yang dimiliki seharusnya mampu memenuhi semua kalangan usia. Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY memiliki berbagai layanan dan sebagian besarnya adalah bagian dari layanan menetap. Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY memiliki tiga unit lokasi layanan yakni Grhatama Pustaka, Rumah Belajar Modern dan juga Jogja Library Center yang masing-masingnya mempunyai ciri khas sendiri.

Perpustakaan yang sudah mengadopsi teknologi informasi tentunya sudah memanfaatkan internet. Internet menjadi wahana bagi masyarakat informasi untuk mencari kebutuhan informasinya. Kebutuhan informasi yang belum tersedia di perpustakaan bisa di dapat oleh pemustaka dengan menggunakan internet, maka dari itu Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY memberikan bentuk inovasi berupa akses wifi gratis bagi pemustaka tanpa terkecuali. Sesuai dengan pernyataan informan Mawan.

Hampir seluruh layanan yang ada di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY dilayankan secara gratis, namun ada beberapa layanan yang aksesnya berbayar dan sudah diatur oleh Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha. Balai layanan Perpustakaan DPAD DIY (Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha, 2020) memberikan biaya akses pada layanan bebas pustaka, layanan akses bioskop dan peminjaman ruangan diskusi tertentu serta denda keterlambatan. Dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama Layanan Akses Berbayar	Tarif
1.	Denda Keterlambatan	Rp. 200.-
2.	Layanan Bebas Pustaka	Rp. 4.000.-/ Lembar
3.	Bioskop 6D	Pelajar = Rp. 10.000.- Umum = Rp. 20.000.-
4.	Ruang Pertemuan/Diskusi	Ruang Auditorium Rp. 3.000.000,-/ 6 jam Ruang Audio Visual Rp. 3.000.000,-/ 4 jam Ruang Seminar Rp. 450.000,-/ 6 jam

Tabel 2. Akses Layanan Berbayar Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY

Dari berbagai layanan yakni 22 layanan yang ada di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY selaku perpustakaan umum (Balai Layanan Perpustakaan Pemda DIY, 2026), ada beberapa layanan yang belum disediakan dikarenakan terjadinya kendala. Salah satunya layanan yang belum tersedia adalah layanan biblioterapi yang melibatkan penggunaan buku dan media lain untuk memfasilitasi perkembangan mental yang normal dan memberikan solusi masalah penting secara klinis (Hasfera, 2018).

Selain layanan biblioterapi yang belum tersedia, terdapat satu layanan yang disarankan oleh pemustaka yakni layanan pemutaran film animasi khusus anak. Layanan audio visual dan pemutaran film sudah tersedia, namun film dan kontennya ditentukan oleh pihak Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Harapannya pemutaran film anak ini bisa secara khusus dijadwalkan atau digunakan secara bebas layaknya layanan anak lainnya seperti: layanan dongeng, layanan bermain anak dan layanan ruang musik anak. Hal ini berdasarkan pernyataan informan Hasna yang merupakan pemustaka yang sering membawa anaknya berkunjung ke Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY.

Informan Hasna juga mengeluhkan tentang jam buka layanan perpustakaan yang tidak melayani hingga malam dan tutup di hari minggu. Selaku perpustakaan umum Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY siap melayani kebutuhan masyarakat. Masyarakat informasi yang dilayani ada yang bekerja ataupun sekolah dan di hari minggu seharusnya bisa ke perpustakaan tetapi karena kondisi anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai hal ini belum bisa terpenuhi.

Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY tidak berdiam diri saja terkait masalah tersebut. Pustakawan dan staf perpustakaan berupaya untuk mencari inovasi agar mendapatkan solusi terkait jam layanan. Bentuk inovasi yang menjadi solusi hal tersebut adalah berupaya membuka layanan hingga hari sabtu yang dulunya hanya sampai hari jumat. Terhitung tertanggal 27 Februari 2023 Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY buka sampai di hari sabtu dengan berbagai cara dan pemanfaatan SDM, staf perpustakaan dan Tenaga Non PNS mengatur strategi demi hal tersebut.

Bentuk inovasi lainnya yang ditawarkan oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY adalah jika di hari perpustakaan tutup layanan yakni pada malam hari dan hari minggu, pemustaka bisa memanfaatkan fasilitas lainnya seperti membaca buku melalui aplikasi iJogja. Pada aplikasi iJogja pemustaka bisa membaca *e-book* di mana saja dan kapan saja. Pemustaka yang tidak memiliki waktu di hari kerja bisa meminjam buku melalui layanan Delivery Order dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Perpustakaan sebagai ruang publik sudah seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat yang dilayaninya, demi kebermanfaatan layanan tersebut. Layanan publik seharusnya bisa diakses oleh semua orang pula termasuk penyandang difabel. Hal ini berpedoman kepada pengertian ruang publik Jurgen Habermas yakni akses bisa dijamin untuk semua warga negara. Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY terus berbenah menuju arah perpustakaan berbasis inklusif bagi pengguna.

Akses untuk penyandang difabel sudah mulai diperhatikan mulai dari penyediaan alat bantu bagi penyandang difabel seperti tongkat, kursi roda dan lain sebagainya, penyediaan lift dengan tombol huruf braille, dan kamar mandi khusus difabel, Ramp (jalur khusus kursi roda), parkir serta koleksi buku braille. Tetapi untuk penyandang difabel layanan yang masih kurang adalah *guiding block* lantai khusus penyandang tuna netra ini belum tersedia. Berdasarkan pernyataan informan Zili:



Gambar 2. Lift Dilengkapi Tombol Huruf Braille

Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY terus berinovasi membangun ruang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat informasi. Perpustakaan ini terus berkembang dan mempunyai harapan besar mengikuti beberapa masukan masyarakat yakni pembuatan *website* yang bisa bicara dan bersuara untuk penyandang difabel, perbaikan toilet difabel agar lebih mempermudah penyandang difabel yang dilengkapi tombol geser pintu dan adanya *benner QR Code* Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY yang dipasang di berbagai tempat publik lainnya seperti tempat perbelanjaan, museum, di tempat rekreasi agar *QR Code* ini nantinya mampu menghubungkan pemustaka di mana saja hanya dengan melakukan *scan barkode* layanan perpustakaan atau koleksi perpustakaan bisa dinikmati.

3.3. Pembangunan masyarakat

Pembangunan masyarakat merupakan salah satu harapan dari keberadaan perpustakaan termasuk Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta ini menduduki peringkat pertama dalam Rakornas bidang perpustakaan tahun 2023 kategori provinsi dengan indeks pembangunan literasi masyarakat tertinggi dan kegemaran membaca tertinggi di tahun 2023. Tetapi disayangkan hal ini berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta di mana menjadi tingkat kemiskinan tertinggi di pulau Jawa yang menyentuh angka 10,23% terhitung bulan Maret 2025. Dalam meraih penghargaan tersebut tentunya ada peran perpustakaan.

Pembangunan masyarakat untuk melawan garis kemiskinan dan melawan kebodohan merupakan salah satu tugas dari perpustakaan selaku ruang publik yang ada hubungannya pula dengan konsep ruang publik Jurgen Habermas yang di dalamnya menganut prinsip sebagai wadah perjuangan.

Ada hubungan antara faktor ekonomi terhadap tingkat literasi yang ada di Yogyakarta, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal ini berbanding terbalik, setelah melakukan wawancara ditemukan bahwa memang tingkat literasi ini terbilang tinggi namun masih rendah untuk taraf dunia. Hal ini didasari oleh pernyataan informan Yukti Tingkat kemiskinan disebabkan pula oleh kesenjangan perjuangan instansi lain, perpustakaan dalam menjalankan perjuangan pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan peningkatan literasi dan kemampuan masyarakat tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang menunjang yang membuat kondisi masyarakat Yogyakarta yang menyentuh tingkat kemiskinan baik dari faktor pendidikan formal dan faktor tingkat inflasi serta dari aspek pemerintah lainnya. Sesuai dengan pernyataan informan Sutris.

Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY memiliki berbagai program yang ditujukan untuk peningkatan kreativitas masyarakat. Mulai dari pelatihan membuat kerajinan tangan untuk anak-anak, pelatihan literasi bagi remaja, *workshop* kepenulisan maupun kegiatan lainnya yang biasanya dilakukan di Grhatama Pustaka maupun di Rumah Belajar Modern.

Biasanya kegiatan pembangunan masyarakat melalui peningkatan kreativitas dilakukan secara rutin baik secara langsung maupun melalui media sosial maupun *zoom*. Peran perpustakaan sangat erat hubungan dengan pendidikan, yakni berguna untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kecerdasan masyarakat. pembangunan masyarakat bisa melalui aspek fisiknya dan bisa juga dari tingkat kompetensinya.



Gambar 3. Workshop Kreatif Kepenulisan Fiksi

Sumber bahan bacaan yang disediakan oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY merupakan bentuk dari usaha menyediakan pengetahuan untuk diserap oleh masyarakat melalui bacaan, tidak sampai disitu saja Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY juga memberikan pelatihan berupa pelatihan secara langsung kepada masyarakat yang diharapkan mampu membangun pola pikir masyarakat sehingga mampu membangun intelektualnya. Konsep yang tidak kalah pentingnya yaitu mendorong masing-masing pribadi masyarakat untuk menyadari kelebihan dan konsep diri yang bagus sehingga nantinya kemampuan ini mampu menunjang kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik lagi.

3.4. Diskursus

Ruang publik mengutamakan diskursus. Diskursus merupakan sebuah upaya untuk mencapai opini publik. Perpustakaan juga menerapkan prinsip diskursus untuk melakukan pelayanan perpustakaan. Dalam mencapai kesepakatan publik, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY berupaya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan mengetahui saran dan juga kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Tindakan pelibatan masyarakat dalam mencapai opini publik dewasa ini banyak dilakukan menggunakan media sosial yang merupakan salah satu sarana dalam berkomunikasi kepada masyarakat secara lebih luas.

Masyarakat informasi yang cenderung telah memanfaatkan teknologi informasi biasanya menggunakan sarana dan prasarana baik koesoner tercetak maupun *survey* secara *online* yang disebarkan oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY maupun mengisi *link online* kepuasan masyarakat yang biasanya disebarkan melalui media sosial. Penggunaan media sosial dalam pengisian tersebut setidaknya mengurangi anggaran karena lebih hemat jika menggunakan akses gratis *google form* dengan jangkauan yang lebih luas dan cepat.

Tidak hanya koesoner dan *survey* yang berbentuk *online* Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY tetap memberikan layanan pengisian saran dan kritik dengan bentuk fisik di mana biasanya di beberapa sudut Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY ini menyediakan kotak saran dan lembar pengisian koesoner. Informan Mawan juga memberitahu bahwa selain *survey* dan koesoner terdapat pula satu kegiatan resmi yang unik dan menjadi hal yang jarang dilakukan oleh perpustakaan umum lain. Balai Lanan Perpustakaan DPAD DIY memiliki suatu kegiatan untuk menampung aspirasi dari seluruh pengguna perpustakaan dari berbagai *stakeholder*, kegiatan ini diberi nama Forum Konsultasi Publik (FKP).

Forum Konsultasi Publik yang rutin diadakan setiap tahunnya ini merupakan kegiatan penyampaian program dan layanan Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY pada tahun tersebut yang nantinya diakhir kegiatan mengajak berbagai *stakeholder* yang terdiri dari berbagai lembaga mulai dari internal hingga eksternal, seperti penyelenggara layanan, Organisasi/Mitra/LSM, akademisi, masyarakat dan pengguna layanan.

Forum Konsultasi Publik (FKP) menghasilkan suatu masukan, kritikan ataupun saran yang ditampung oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Semua masukan, kritikan dan juga saran

nantinya di rapatkan untuk di pertimbangkan apakah saran, kritikan dan masukan tersebut akan diimplementasikan pada tahun berikutnya. Jika keadaan tidak memungkinkan maka akan dicari solusi yang terbaik dan saran, kritikan dan masukan itu akan ditampung dan dipertimbangkan mana yang lebih diprioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan tenaga kerja.

Melihat dari kegiatan yang dilakukan seharusnya kegiatan ini diberi nama Forum Diskusi Publik (FDP) dikarenakan jika Forum Konsultasi Publik (FKP) kesan yang ditimbulkan dari terminologi konsultasi berpotensi dimaknai komunikasi yang arahnya tidak membangun kesetaraan hak, sedangkan pada kegiatan ini seluruh peserta dari berbagai *stake holder* dimaksudkan memiliki hak kesetaraan dalam mengemukakan pendapat. Lebih cocok jika nama kegiatan ini menjadi Forum Diskusi Publik (FDP) yang memberikan makna kesetaraan karena makna konsultasi itu adalah terminologi yang sifatnya hirarkis seolah-olah masih ada salah satu pihak yang lebih dominan.

Sarana diskusi lainnya yang juga merupakan sarana berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat ataupun pemustaka merupakan kegiatan bedah buku ataupun bedah naskah kuno yang dilakukan oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan ini didanai oleh dana keistimewaan, seperti yang diketahui bahwa selaku layanan publik akses anggaran Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sepenuhnya didanai oleh APBN dan APBD serta dikarenakan statusnya sebagai Daerah Istimewa maka, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY memiliki dana tambahan berupa dana keistimewaan tersebut. Hal ini berdasarkan pernyataan informan Wita.

Interaksi lainnya yang terjadi di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY yang berkaitan dengan komunikasi secara langsung lebih banyak terjadi di masing-masing unit layanan. Selain itu diskursus yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan struktural saja melainkan ada dialog yang dihasilkan melalui ruang-ruang diskusi yang membahas apapun sesuai kebutuhan pemustaka dengan penyediaan gazebo dan ruang khusus *free function*. Saran, kritik, dan masukan juga banyak disampaikan ketika terjadi kunjungan ataupun sosialisasi yang dilakukan Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY.

3.5. Transformasi

Transformasi pada perpustakaan terjadi mengikuti kebutuhan masyarakat informasi. Jika dahulu pemustaka datang ke perpustakaan hanya untuk membaca dan meminjam serta mengembalikan bahan pustaka, kini bertransformasi, pemustaka bisa datang ke perpustakaan memanfaatkan akses ruang publik yang disediakan. Akses ruang publik *indoor* dan *outdoor* seperti gazebo, ruang diskusi, area *outdoor* dan ruang *free function* yang disediakan oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY bisa dimanfaatkan untuk sarana bertukar pikiran, berbincang dengan teman, berdiskusi dan lain sebagainya. Akses ini bukti bahwa perpustakaan mampu menciptakan ruang yang di mana ada kebebasan dan kesetaraan di dalamnya.



Gambar 4. Pemustaka Memanfaatkan Ruang Publik Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY

Transformasi perpustakaan terus terjadi mengikuti perkembangan pemustaka. Transformasi secara besar-besaran terjadi pada saat pandemi Covid-19. Pandemi membuat semua instansi dan tidak terkecuali perpustakaan bertransformasi menyesuaikan keadaan di mana kegiatan banyak

dilakukan di dalam rumah. Kegiatan lembaga-lembaga termasuk perpustakaan pun berbenah dan harus dilakukan secara *online*. Perpustakaan juga mulai serius dalam penggunaan media non-cetak dan aplikasi maupun media sosial seperti instagram, youtube dan aplikasi *meeting* berbasis *online* lainnya.

Perubahan perpustakaan yang terlihat jelas sebenarnya pada aspek yang awalnya analog ke digital. Adanya pendaftaran anggota dan kartu anggota digital yang diciptakan Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY melalui aplikasi Si Yokca membuat proses keanggotaan tidak perlu datang langsung ke perpustakaan dan peminjaman serta pengembalian koleksi juga bisa dilakukan melalui aplikasi Si Yokca.

Tantangan dalam bertransformasi tentunya dirasakan oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY terutama dalam segi kemampuan sumber daya manusia, yang harus terus di *upgrade*. Proses pembangunan kemampuan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam menghadapi transformasi memerlukan waktu, peningkatan biasanya melalui pelatihan kepada tenaga kerja Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Transformasi juga bertujuan untuk akses kepada pemustaka yang lebih mudah. Berikut pernyataan informan Hasna selaku pemustaka yang menganggap transformasi perpustakaan dengan media sosial lebih memudahkan aksesnya.

Transformasi perpustakaan yang berpedoman kepada perpustakaan pusat yakni Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengarahkan seluruh perpustakaan bertransformasi berbasis inklusi sosial. Untuk kesamarataan program tersebut Perpustakaan melatih *Person in Charge* (PIC) dari setiap perpustakaan umum.

Pelatihan bagi PIC ini berupa *workshop*. Selain anjuran dari Perpustakaan sebenarnya Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY jauh sebelum itu sudah melakukan transformasi berkaitan dengan prinsip bagaimana perpustakaan itu tidak hanya menyediakan koleksi bahan bacaan saja melainkan bahan bacaan atau buku itu ilmunya bisa diterapkan bagi masyarakat. Implementasi dari ide ini berupa pelatihan yang banyak dilakukan di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY tetapi kegiatan berbasis inklusi ini lebih banyak dilakukan di Rumah Belajar Modern yang lokasinya berada di Sewon Bantul. Pelatihan tersebut contohnya seperti pelatihan kreativitas masyarakat, pelatihan hidroponik, pelatihan kerajinan tangan bagi anak-anak, pelatihan literasi informasi bagi lansia, serta kegiatan serupa yang berhubungan dengan peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Transformasi ini berkaitan pula dalam bentuk inovasi perpustakaan. Inovasi ini menghasilkan perubahan-perubahan yang bisa berasal dari program lama yang di modifikasi sesuai kebutuhan masyarakat informasi ataupun program baru yang ditimbulkan akibat dari transformasi. Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY mempunyai suatu tim khusus yang menangani perihal inovasi. Tim ini diberi nama Tim KIPP (Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik). Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY memiliki struktur bagian bidang, di mana masing-masing bidangnya dituntut untuk memberikan masukan berupa satu inovasi baru di setiap tahunnya. Inovasi yang terpilih nantinya diikuti sertakan dalam ajang lomba tingkat nasional. Contoh dari inovasi yang pernah diikuti sertakan dalam lomba yaitu Si Yokca dan Sepatu Jolifa (Layanan Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All).

Inovasi juga harus diiringi oleh komitmen yang kuat, komitmen yang kuat ini nantinya akan membuat inovasi tersebut bisa berjalan dan terus berkembang mengikuti transformasi serta perubahan masyarakat ke arah masyarakat informasi. Dalam melakukan transformasi Balai Layanan Perpustakaan berusaha untuk mengikuti kebutuhan masyarakat. Anjuran bertransformasi berbasis inklusi sosial yang dicanangkan oleh Perpustakaan sebenarnya sudah lebih dulu dilakukan Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sehingga perpustakaan ini membentuk tim khusus yakni Tim KIPP (Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) untuk berinovasi menghadapi transformasi selaku layanan publik. Hal ini tentunya membutuhkan komitmen yang kuat agar program inovasi terus berjalan dan berkembang.

3.6. Pembusukan

Perpustakaan juga mengalami pembusukan layanan perpustakaan yang menyebabkan kehilangan bentuk layanan perpustakaan dalam pengertian yang ideal. Akibat dari transformasi dan perkembangan zaman, perpustakaan yang dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat informasi tentunya mengalami pembusukan/kehilangan sebagian dari fungsi lamanya yang sudah tidak efisien untuk digunakan. Namun untuk fungsi secara ideal, fungsi utama perpustakaan tidak bisa secara penuh tergantikam oleh teknologi. Inovasi yang dihasilkan juga menyebabkan kombinasi secara *hybrid* di mana analog dan digital tetap dilakukan.

Inovasi Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY selaku ruang publik di tengah masyarakat informasi tidak membuat fungsinya sebagai pengelola bahan perpustakaan untuk pendidikan, penelitian dan pelestarian informasi serta rekreasi berubah. Di tengah masyarakat informasi yang semakin banyak tuntutan membuat Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY berinovasi dalam upaya pemanfaatan perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya menyediakan informasi saja melainkan juga menjadi tempat masyarakat melakukan kegiatan maupun berdiskusi.

Pada aspek pembusukan dalam melakukan inovasi, perpustakaan selaku ruang publik yang terlihat adalah dari sisi komunikasi secara langsung yang tergantikan dengan adanya media teknologi. Pemustaka merasa media yang membantu komunikasi ini memang sangat bermanfaat apalagi di saat terjadinya pandemi tetapi komunikasi secara langsung masih tetap diperlukan apalagi untuk para pemustaka yang gagap teknologi. Penggunaan aplikasi untuk membuat kartu anggota yakni aplikasi Si Yokca saja masih membingungkan bagi sebagian pemustaka yang tidak melek literasi digital di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Berdasarkan dengan wawancara bersama pemustaka Hasna.

Dampak selain komunikasi langsung yang semakin berkurang akibat teknologi, ada beberapa layanan yang dahulunya ada tetapi usang dan tidak ada lagi. Layanan yang pertama sudah tidak ada lagi di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY yaitu katalog manual. Katalog manual tersebut telah tergantikan dengan munculnya inovasi *Online Public Access Catalog* (OPAC). OPAC ini lebih mempermudah pemustaka maupun pustakawan dalam mengecek ketersediaan bahan koleksi perpustakaan.

Kedua, layanan CD/DVD yang tergantikan dalam format file. Ketiga, layanan yang sudah tidak ada yaitu layanan yang menyediakan kurir untuk mengantarkan surat Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, sekarang tergantikan dengan keberadaan surat pemerintahan berbasis elektronik. Keempat, layanan perpustakaan ini semakin berinovasi dan bergerak misalnya jika dulu melakukan layanan dongeng hanya dengan cara bertatap muka secara langsung, sekarang bisa menggunakan media sosial. Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sendiri rutin melakukan layanan dongeng secara virtual menggunakan media sosial Instagram di setiap hari Jum'at. Kelima, pergeseran layanan dengan penggunaan aplikasi.

Informan Deti juga menambahkan bahwa dahulu ada layanan *photocopy* di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY karena tidak terlalu signifikan dibutuhkan maka layanan ini ditiadakan. Layanan ini sudah kurang dibutuhkan lagi mengingat Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY menyepakati untuk beralih pada format surat-menyurat digital. Pembusukan merupakan sebuah proses yang hilang akibat dari perkembangan zaman. Begitu juga dengan perpustakaan selaku lembaga dinamis yang berorientasi sebagai layanan publik tentunya berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY berusaha mengefisienkan layanan yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berkaitan dengan fungsi ideal perpustakaan belum ada pembusukan yang terjadi secara ekstrem, hanya saja lebih kepada perubahan dan juga penyesuaian layanan dengan keadaan masyarakat informasi. Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sudah melakukan banyak inovasi dan berperan aktif agar layanan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Namun, usaha itu akan menjadi lebih efektif jika masyarakat turut andil dalam berperan ikut aktif pada kegiatan dan program yang dicanangkan Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY selaku ruang publik.

4. PEMBAHASAN

Konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana perpustakaan dapat berfungsi sebagai ruang sosial yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi, membangun pengetahuan, serta membentuk opini publik. Dalam konteks Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, fungsi tersebut dapat dianalisis melalui beberapa dimensi utama ruang publik, yaitu sebagai wahana perjuangan, diskursus publik, transformasi ruang publik, serta potensi kemunduran ruang publik sebagaimana dijelaskan oleh Sumaryanto (2010).

Ruang publik Jürgen Habermas dipahami sebagai suatu konsep mengenai ranah kehidupan bersama di mana aktivitas sosial berlangsung dan memungkinkan terbentuknya opini publik. Dalam ruang tersebut, setiap warga negara memiliki jaminan akses yang setara untuk berpartisipasi. Prinsip utama yang mendasarinya adalah kesamaan hak, termasuk kebebasan untuk menyampaikan pendapat, mempublikasikan gagasan, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi dalam kehidupan masyarakat (Habermas, 1964).

Pemikiran Habermas tentang ruang publik berkembang melalui berbagai kajian dan mengalami sejumlah perubahan dari waktu ke waktu. Gagasan tersebut dijelaskan secara mendalam dalam karyanya berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere* yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1962 dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1989. Dalam karya tersebut, Habermas menganalisis munculnya ruang publik borjuis serta menjelaskan bagaimana perubahan struktur ruang publik terjadi pada masa modern. Perubahan ini ditandai oleh semakin kuatnya pengaruh kapitalisme, industri budaya, serta dominasi organisasi ekonomi dan kelompok bisnis besar dalam kehidupan publik (Hendrawan, 2015).

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep awal Habermas mengenai ruang publik borjuis sering dipahami sebagai ruang bagi individu-individu privat yang berkumpul dan berinteraksi sebagai publik. Habermas kemudian menelaah lebih jauh perbedaan antara ranah privat dan ranah publik dalam perspektif filsafat dan bahasa. Dari kajian tersebut, ia menemukan bahwa pada abad ke-18 ruang publik borjuis berfungsi sebagai sarana mediasi antara persoalan individu yang bersifat privat seperti yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan ekonomi dengan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan sosial dan kehidupan publik (Hendrawan, 2015).

Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama dan membangun konsensus sosial, sehingga berbagai kepentingan pribadi dapat diakomodasi dalam kerangka kepentingan publik. Dalam konteks masyarakat sipil, ruang publik tercermin dalam struktur sosialnya, di mana pencarian kebenaran dan pembentukan opini publik berlangsung melalui dinamika dialektika yang terjadi di dalam ruang publik masyarakat tersebut (Habermas, 2012).

Terdapat perbedaan pandangan dalam melihat keterkaitan antara konsep ruang publik dan perpustakaan umum. Kebijakan publik kerap menempatkan perpustakaan umum sebagai bagian dari infrastruktur ruang publik dalam pengertian Habermasian. Namun, muncul perdebatan ketika perpustakaan umum dipahami semata-mata sebagai lembaga ruang publik Habermasian, karena diskursus rasional mengenai isu budaya dan politik hanyalah salah satu dimensi dari misi demokratis perpustakaan. Pada dasarnya, misi demokrasi perpustakaan umum mencakup keseluruhan fungsi yang berkaitan dengan ruang publik. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai perpustakaan umum akan lebih komprehensif apabila didasarkan pada beragam pendekatan teori ruang publik, tidak hanya bertumpu pada gagasan Jürgen Habermas semata (Larsen, 2021). Sebagai ruang publik,

Perpustakaan umum memiliki sejumlah karakteristik utama yaitu perpustakaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembiayaan kegiatan perpustakaan bersumber dari dana publik. Perpustakaan menyediakan akses informasi yang luas dan mudah dijangkau, didukung oleh layanan peminjaman yang memadai bagi pengguna. Layanan diberikan oleh pustakawan profesional secara objektif, tanpa kepentingan tersembunyi maupun prasangka tertentu (Sumaryanto, 2010).

Dengan karakteristik tersebut, perpustakaan umum memenuhi syarat untuk berfungsi sebagai *public sphere* dengan menjunjung tinggi prinsip kebebasan serta kemudahan akses informasi tanpa pungutan biaya. Pengguna perpustakaan juga relatif terbebas dari dominasi kepentingan ekonomi dan politik dalam penyediaan informasi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan. Pemaparan ini menunjukkan bagaimana konsep ruang publik dapat dipahami dalam hubungannya dengan peran perpustakaan umum (Hendrawan, 2015). Penerapan teori ruang publik dalam konteks perpustakaan umum telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian.

Sebagai wahana perjuangan, ruang publik dipandang sebagai arena perjuangan; pada awalnya merupakan wadah perlawanan kaum borjuis terhadap dominasi kekuasaan, yang sejalan dengan perpustakaan sebagai sarana melawan kebodohan, mendorong pencerahan, serta menegakkan keadilan dan kebenaran informasi.

Diskursus menjadi elemen utama dalam pembentukan opini publik, prinsip yang juga diterapkan dalam praktik layanan perpustakaan. Selain itu, terjadi transformasi di mana ruang publik mengalami berbagai bentuk perubahan seperti depolitisasi, refeodalisasi, dan degradasi fungsi, sementara perpustakaan menghadapi tantangan berupa komersialisasi yang menyimpang dari fungsi awalnya. Pembusukan terhadap ruang publik juga dapat terjadi apabila ruang publik mengalami kemunduran akibat praktik lobi dan aktivitas kehumasan yang berlebihan, sehingga perpustakaan pun berisiko mengalami penurunan kualitas layanan yang dapat menjauhkan institusi tersebut dari bentuk idealnya sebagai ruang publik (Sumaryanto, 2010).

4.1. Perpustakaan sebagai arena perjuangan

Dalam perspektif Habermas, ruang publik awalnya muncul sebagai arena perjuangan masyarakat sipil, khususnya kaum borjuis, untuk menentang dominasi kekuasaan feodal melalui diskusi rasional di ruang-ruang sosial. Konsep tersebut dalam konteks perpustakaan dapat dimaknai sebagai upaya menghadirkan akses informasi yang adil bagi masyarakat sehingga mampu melawan keterbatasan pengetahuan dan ketimpangan akses informasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY berupaya menjalankan fungsi tersebut melalui penyediaan koleksi yang beragam serta pengembangan layanan informasi berbasis kebutuhan masyarakat. Upaya pemenuhan kebutuhan koleksi menjadi strategi penting agar perpustakaan dapat menjadi sumber pengetahuan yang inklusif bagi masyarakat informasi yang memiliki latar belakang dan kebutuhan berbeda. Ketersediaan koleksi tercetak yang cukup besar serta akses terhadap koleksi digital melalui aplikasi iJogja menunjukkan adanya upaya perpustakaan untuk memperluas jangkauan layanan informasi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua kebutuhan informasi masyarakat dapat dipenuhi sepenuhnya oleh perpustakaan. Kondisi tersebut merupakan fenomena yang umum terjadi dalam institusi perpustakaan karena keterbatasan anggaran, seleksi koleksi, serta dinamika penerbitan buku yang sangat cepat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan Zili:

“Sebetulnya pada dasarnya tidak ada perpustakaan yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Jadi pentingnya untuk kita menjalin kerjasama salah satunya adalah itu, ada beberapa buku yang diterbitkan di Indonesia tidak mungkin kita beli semuanya, karena banyaknya pertimbangan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antarperpustakaan menjadi strategi penting dalam memperkuat fungsi perpustakaan sebagai wahana perjuangan melawan keterbatasan akses informasi. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat serta memperluas akses terhadap pengetahuan.

Sebagai wahana perjuangan jika ruang publik Borjuis Jurgen Habermas diartikan sebagai wahana perjuangan melawan ketertindasan maka perpustakaan merupakan wahana perjuangan melawan kebodohan, pencerahan masyarakat, penyebaran keadilan dan kebenaran. agar hal itu dapat di lakukan. Berdasarkan pernyataan informan bisa dianalisis bahwa pemenuhan kebutuhan layanan merupakan suatu hal yang terjadi terus menerus mengikuti kebutuhan masyarakat atau pemustaka. Di zaman masyarakat informasi, layanan yang harus disediakan oleh perpustakaan juga semakin beragam dan semakin inovatif demi bisa menjadi ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan walaupun dengan kebutuhan yang berbeda-beda.

Meskipun ada beberapa layanan yang belum tersedia seperti layanan biblioterapi dan pemutaran film animasi anak, namun Perpustakaan sudah mengusahakan terus berbenah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat informasi. Menurut Dian Hafera dalam sub tulisannya Perpustakaan "*A Place of Biblioteraphies*" dalam situasi di mana semua anggota masyarakat diharapkan berperan aktif dan positif, pustakawan dan staf perpustakaan diharapkan dapat mengidentifikasi peran mereka dalam membangun kembali masyarakat yang sedang berjuang menghadapi masalah. Perpustakaan dan ruang baca dengan gudang ilmu dan informasi dapat menjadi titik terapi bagi masyarakat yang terkena dampak dengan penerapan metode biblioterapi (Hasfera, 2018).

Akses perpustakaan terbilang gratis dan hanya beberapa yang membayar dikarenakan hal ini mengikuti peraturan daerah yang berlaku. Layanan yang belum tersedia nantinya akan ditinjau kembali mengikuti saran dan masukan dari pemustaka selaku pengguna layanan publik. Saran layanan tersebut akan dipertimbangkan dengan skala prioritas dan mengimbangi anggaran juga SDM yang dimiliki Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pembangunan masyarakat dan juga pembangunan ekonomi masyarakat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan kerjasama dengan berbagai lembaga karena pembangunan masyarakat ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, namun Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY turut serta dalam usaha pembangunan masyarakat baik melalui peningkatan kemampuan pengetahuan melalui koleksi ataupun praktik langsung mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas masyarakat.

4.2. Diskursus sebagai elemen pembentuk opini publik

Habermas menekankan bahwa diskursus rasional merupakan elemen utama dalam pembentukan opini publik dalam ruang publik. Diskursus memungkinkan individu untuk bertukar gagasan, menyampaikan pendapat, serta membangun pemahaman bersama mengenai suatu isu yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam konteks Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, fungsi diskursus tersebut tercermin melalui berbagai fasilitas dan layanan yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan pertukaran gagasan di antara pengguna perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi informasi, tetapi juga menyediakan ruang belajar, ruang diskusi, serta berbagai kegiatan literasi yang mendorong partisipasi masyarakat.

Keberadaan ruang diskusi dan area belajar bersama memungkinkan pengguna perpustakaan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan secara informal. Interaksi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik diskursus dalam ruang publik, di mana individu dapat menyampaikan gagasan, berdiskusi mengenai informasi yang diperoleh, serta membangun pemahaman kolektif terhadap suatu isu. Dalam masyarakat informasi, proses diskursus semacam ini menjadi semakin penting karena arus informasi yang sangat besar memerlukan ruang untuk proses refleksi dan pertukaran pemikiran.

Selain itu, kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan juga berperan dalam memperkuat fungsi diskursus publik. Program-program literasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan membaca masyarakat, tetapi juga membuka ruang dialog antara masyarakat, pustakawan, serta berbagai komunitas literasi. Dengan demikian, perpustakaan

berperan sebagai mediator dalam proses pembentukan opini publik yang berbasis pada informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.3. Transformasi ruang publik dalam konteks perpustakaan

Habermas juga menjelaskan bahwa ruang publik mengalami transformasi seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Transformasi tersebut dapat berupa depolitisasi ruang publik, refeodalisasi, maupun penurunan fungsi ruang publik akibat dominasi kepentingan ekonomi dan media massa. Dalam konteks perpustakaan, transformasi tersebut dapat terlihat dari perubahan peran perpustakaan di era digital dan masyarakat informasi. Perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi cetak, tetapi juga berkembang menjadi pusat layanan informasi digital, pusat literasi, serta ruang interaksi sosial bagi masyarakat.

Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY menunjukkan bentuk transformasi tersebut melalui berbagai inovasi layanan yang memanfaatkan teknologi informasi. Pengembangan layanan digital seperti aplikasi iJogja merupakan contoh bagaimana perpustakaan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat informasi yang semakin bergantung pada akses informasi digital.

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan bagi masyarakat. Namun demikian, proses transformasi ini juga perlu diimbangi dengan upaya mempertahankan fungsi utama perpustakaan sebagai lembaga publik yang menyediakan akses informasi secara terbuka dan bebas bagi masyarakat.

4.4. Potensi kemunduran ruang publik

Habermas juga mengingatkan bahwa ruang publik dapat mengalami kemunduran apabila dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, seperti praktik lobi politik atau dominasi kepentingan ekonomi yang berlebihan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ruang publik kehilangan independensinya sebagai ruang diskursus yang bebas dan rasional. Dalam konteks perpustakaan, potensi kemunduran ruang publik dapat terjadi apabila layanan perpustakaan terlalu dipengaruhi oleh kepentingan komersial atau kebijakan yang membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Oleh karena itu, perpustakaan perlu menjaga independensi dan profesionalitas dalam penyediaan layanan informasi.

Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sebagai perpustakaan yang dibiayai oleh dana publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap bersifat terbuka, inklusif, dan bebas dari kepentingan tertentu. Prinsip layanan berbasis inklusi sosial yang diterapkan oleh perpustakaan menjadi salah satu upaya untuk menjaga fungsi perpustakaan sebagai ruang publik yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses informasi. Dengan demikian, upaya menjaga kualitas layanan, profesionalitas pustakawan, serta keterbukaan akses informasi menjadi faktor penting agar perpustakaan tidak mengalami kemunduran fungsi sebagai ruang publik. Perpustakaan harus tetap mempertahankan nilai-nilai demokratis seperti kesetaraan akses, kebebasan memperoleh informasi, serta keterbukaan dalam penyebaran pengetahuan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY mengembangkan berbagai inovasi layanan dalam menghadapi masyarakat informasi dengan merujuk pada konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Inovasi tersebut dapat dilihat melalui empat aspek, yaitu wahana perjuangan, diskursus, transformasi, dan pembusukan. Pada aspek wahana perjuangan, perpustakaan berupaya memenuhi kebutuhan koleksi, layanan, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi, aplikasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak.

Aspek diskursus diwujudkan melalui interaksi antara perpustakaan dan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media digital sebagai sarana memperoleh masukan terhadap pengembangan layanan. Selanjutnya, aspek transformasi menunjukkan adanya perubahan dan pengembangan layanan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat informasi, sementara

aspek pembusukan menggambarkan adanya layanan yang mulai ditinggalkan karena tidak lagi efektif atau sesuai dengan kebutuhan pengguna. Secara keseluruhan, terdapat 22 layanan yang mencakup layanan menetap dan layanan ekstensi sebagai bentuk inovasi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Sebagai ruang publik, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY juga perlu terus meningkatkan pemerataan layanan, khususnya bagi kelompok difabel dan lansia, melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti guiding block, koleksi khusus lansia, serta layanan biblioterapi agar perpustakaan dapat melayani seluruh lapisan masyarakat secara lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Maret 2025 - Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta*.
<https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1680/profil-kemiskinan-di-d-i--yogyakarta-maret-2025.html>
- Balai Layanan Perpustakaan Pemda DIY. (2026). *Jenis Layanan | Balai Layanan Perpustakaan Pemda DIY*. <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/static/Jenis%20Layanan>
- Fitriyai, F. N. (2021). *Pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Pemikiran Jürgen Habermas*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Grhatama Pustaka. (2023). *Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY*. <http://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/>
- Habermas, J. (1964). The public sphere: An encyclopedia article (1964). *New Critical Writings in Political Sociology: Volume Two: Conventional and Contentious Politics*, 3(3), 481–487.
<https://doi.org/10.2307/487737>
- Habermas, J. (2012). *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis* (I. R. Muzir, Ed.). Tiara Wicara.
- Hartono. (2017). *Pengetahuan Dasar Perpustakaan Digital*. Sagung Seto.
- Hasfera, D. (2018). Bibliotherapy: Layanan bimbingan konseling di perpustakaan. *Shaut Al-Maktabah Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 10(1), 39–62.
<https://doi.org/10.15548/shaut.v10i1.3>
- Hendrawan, M. (2015). Peran Perpustakaan Umum dalam Membangun Masyarakat Informasi : Sebuah Telaah Ruang Publik Jürgen Habermas. *Semiloka Kepustakawanan Infonesia 2015 "LibraryMove On: Bangga Menjadi Profesional Di Dunia Perpustakaan Dan Informasi,"* (August).
https://www.academia.edu/27220542/Peran_Perpustakaan_Umum_dalam_Membangun_Masyarakat_Informasi_Sebuah_Telaah_Ruang_Publik_Jürgen_Habermas
- Krismayani, I. (2020). Kontribusi Unit Usaha Dalam Mewujudkan Perpustakaan Sebagai Public Sphere Di Perpustakaan Unissula – Semarang. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 41(2), 281. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v41i2.602>
- Larsen, H. (2021). The public sphere and Habermas: reflections on the current state of theory in public library research. *Journal of Documentation Emerald Publishing*, 77(1), 251–258.
<https://doi.org/10.1108/JD-05-2020-0075>
- Mar, K. M. Del. (2021). Supplementary materials for the talk “ Public sphere institutions or safe spaces — can libraries be both ?” *New Librarianship Symposia*, 1(October 28).
<https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=newlibrarianshipsymposia>
- Masriastri, I. G. A. K. Y. (2018). Perpustakaan dan Masyarakat Informasi. *Perpustakaan Dan Masyarakat Informasi*, 3(Vol. 3, No. 2, Desember 2018), 72–83.
- Pendit, P. L. (2003). *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. JIP-FSUI.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda DIY (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137206/perda-no-1-tahun-2020>

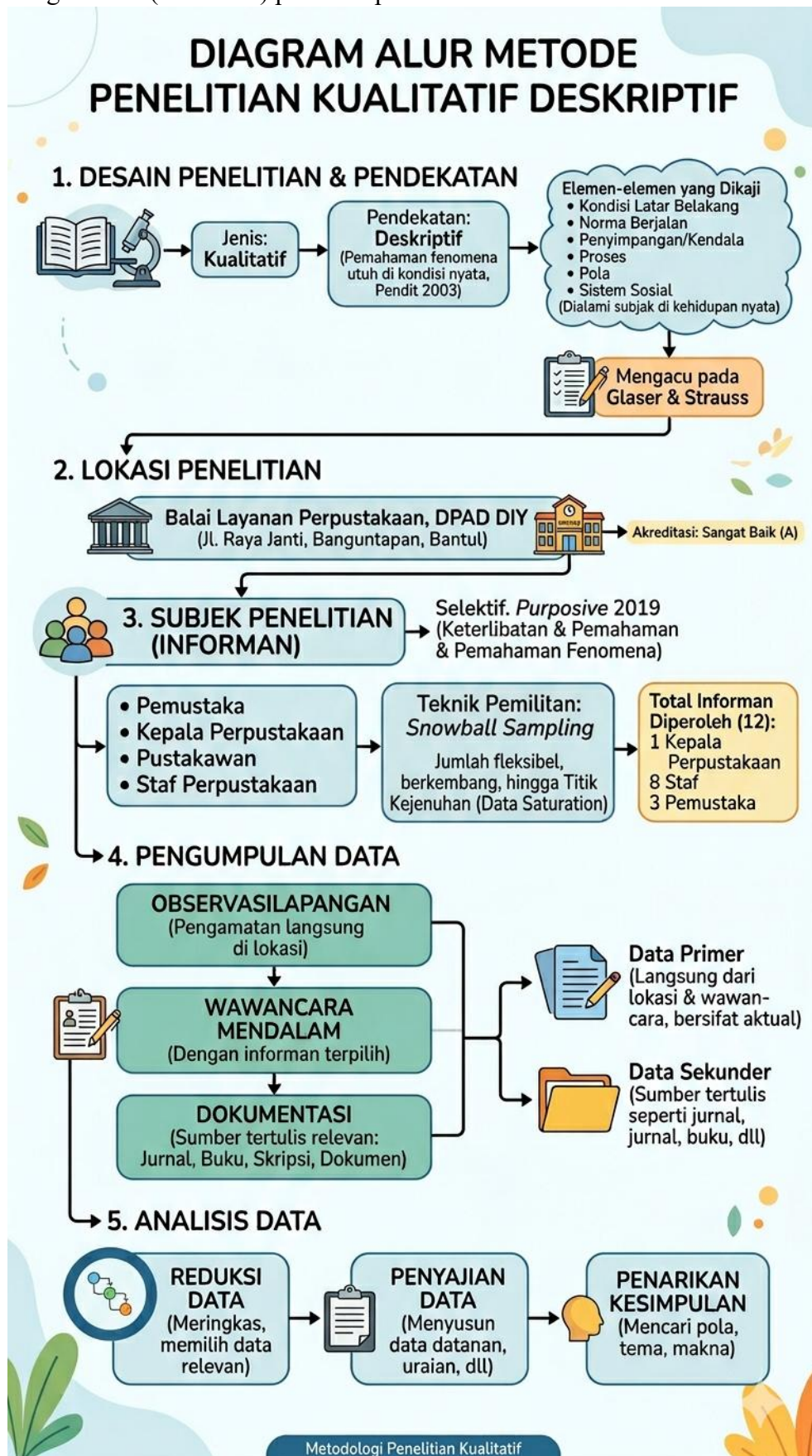
- Perpusnas. (2023). *Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023*.
<https://www.instagram.com/p/CpbzkbrSm-s/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>
- Suardi, I. W. (2019). *Ismail Wekke Suardi, Metode Penelitian Sosial, Angewandte Chemie International* (11th ed., Vol. 6). Gawe Buku.
- Sumaryanto, Y. (2010). *RUANG PUBLIK JÜRGEN HABERMAS DAN TINJAUAN ATAS PERPUSTAKAAN UMUM INDONESIA*. UNIVERSITAS INDONESIA.

Lampiran 1 : informan penelitian

No.	Nama	Jabatan	Peran
1.	Deti	Kepala Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY	Memberikan informasi dan keterangan kondisi dan situasi Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY dalam menghadapi masyarakat informasi dan selaku ruang publik
2.	Zili	Bagian Seksi Layanan Perpustakaan Menetap	Memberikan informasi terkait layanan menetap yang ada di DPAD DIY.
3.	Anas	Bagian Pegawai Perpustakaan Yang Berwenang Dalam Bidang Hubungan Masyarakat	Memberikan informasi selaku Humas dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.
4.	Mawan	Pengolahan Layanan Otomasi Dan Kerjasama Perpustakaan	Memberikan informasi terkait kerjasama perpustakaan salah satunya Sepatu Jolifa.
5.	Wita	Bagian Seksi Layanan Perpustakaan Ekstensi	Memberikan informasi terkait layanan ekstensi yang ada di DPAD DIY.
6.	Mukhlis	Bagian Pengelola Perpustakaan dan Pengelola Pustaka Elektronik	Memberikan informasi terkait dengan pengelolaan perpustakaan, baik yang secara langsung maupun elektronik contohnya e-book.
7.	Sutris	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Memberikan informasi terkait anggaran pengembangan perpustakaan selaku ruang publik dalam menghadapi masyarakat informasi.
8.	Yukti	Rumah Belajar Modern	Memberikan informasi terkait kegiatan Rumah Belajar Modern.
9.	Dirman	Jogja Library Center	Memberikan informasi terkait kegiatan pada unit Jogja Library Center..
10.	Tita	Pemustaka (Siswa)	Memberikan keterangan selaku pemustaka/ masyarakat informasi yang merasakan layanan perpustakaan.
11.	Hasna	Pemustaka (Ibu Rumah Tangga)	Memberikan keterangan selaku pemustaka/ masyarakat informasi yang merasakan layanan perpustakaan.
12.	Rosma	Pemustaka (Mahasiswa)	Memberikan keterangan selaku pemustaka/ masyarakat informasi yang merasakan layanan perpustakaan. dan memberikan informasi tentang kegiatan Forum Konsultasi Publik.

Sumber: Data Primer diolah tahun 2026

Lampiran 2 : diagram alir (flowchart) prosedur penelitian



Sumber: Data Primer diolah tahun 2026